

Solmadapar Tanyakan Korupsi Obat Cacing

PONTIANAK, TRIBUN - Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) mempertanyakan rentetan dugaan kasus korupsi di Kalbar yang tidak ada tindakan oleh aparat penegak hukum. Solmadapar menyebutkan kerugian daerah per 31 Desember 2010 diperkirakan Rp 156,05 miliar, dan \$ AS 11.709 juta dari 178 kasus yang tidak ada tindak lanjutnya.

Sekretaris Jenderal Soma-

dapar, Anton, menuturkan hanya ada satu kasus yang telah memiliki kekuaran hukum tetap yaitu terpidana RHA selaku eks Bendahara proyek Biro Umum yang telah ada surat keterangan tanggung jawab mutral (SKTJM). Yang mana sampai saat ini justru proses hukumnya tidak jelas sebesar Rp 22 juta.


"Sebanyak 18 Kasus sebesar Rp 43 miliar, seperti di dalamnya bendahara BKD tahun 2005/2008 dengan nilai

kerugian Rp 505,826 juta. Sampai saat ini belum ada perkembangan penanganannya. Kami menilai penanganan kasus korupsi di Kalbar mandul dan berjalan di tempat. Gubernur Kalbar selaku pemegang kekuasaan belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI terkait penyelesaian kerugian daerah," kata Anton kepada *Tribun*, kemarin.

Ia berharap dengan dibukanya posko *Ganyang Korupsi* dari

tanggal 6-12 Desember, yang berakhir hari ini, masyarakat bisa bersama-sama memerangi korupsi di legislatif dan eksekutif maupun yudikatif.

Terkait dengan 68 kasus korupsi janji Kajati Kalbar, Jasman Panjaitan, Anton menuturkan itu adalah kasus lama yang coba dimunculkan kembali. Sebagai contoh kasus korupsi yang terjadi di daerah

 Bersambung ke Hal 15

Solmadapar Tanyakan

Sambungan Hal. 9

Sanggau dalam hal pengadaan obat cacing untuk 54 ribu SD.

"Berdasarkan surat kepala Kejati Kalbar nomor B-1239/Q.1/Fd.1/06/2008 tanggal 16 Juni perihal permintaan melakukan audit telah dilaksanakan BPK. Dimana disebutkan terjadi kerugian negara sebesar Rp 7,1 miliar. Kasus ini ditangani

sejak 2008, Kajati mau nunggu apalagi, sebab jelas dalam Pasal 21 UU Nomor 31/1999 tentang Tipikor, bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, dapat dituntut," jelas Anton.

Ia menilai, jika dikaitkan dengan APBD 2012 terkait anggaran pendidikan yang tidak mencapai 20 persen, hal ini menunjukkan Pemprov Kalbar sengaja menjadikan bodoh masyarakat Kalbar. Sehingga masyarakat Kalbar tidak cerdas dalam upaya memerangi korupsi kekuasaan. (rhd)